

EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI DESA SENDANGSARI KECAMATAN PAJANGAN BANTUL

Oleh:
Sriyanto dan Cicuk Kusmarianto²

Abstract

Poverty still become an important problem in Indonesia and still no signs indicate that this problem will be solved. To improve the effectiveness of poverty reduction and job creation, the government launched the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri).

Through PNPM Mandiri, there was improvement the mechanism for poverty alleviation involving society elements, start from planning, implementation, until monitoring and evaluation. Through participatory development process, critical awareness and community independence especially poor society which can be developed so that they will be an subject instead of an object in poverty reduction efforts.

This research was done based on qualitative descriptive methods which aimed to clearly illustrates the empirical facts that occurred in the field and elaborate into a statements in accordance with the phenomenon that occurs. In addition, data collection techniques used in this study were observation method, interview, and documentation.

The result showed that PNPM Mandiri in Sendangsari Village was done effectively and well-implemented. Nevertheless, there were still found some prolems including limitation of human resources, no progress in cooperation with the private sector yet, and still not all poor people got the independent direct assistance.

Keywords: Implementation, Independent Community Empowerment Programme

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia dan sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda terselesaikannya masalah ini. Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak yang perlu penanganan secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Peran serta dunia

usaha dan masyarakat juga belum optimal sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan pemecahan pokok permasalahan. Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat menyeluruh.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimulai sejak tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan

dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Masalah efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering tumpang tindih antar proyek diharapkan juga dapat terpecahkan. Program PNPM Mandiri sasarannya bukan untuk masyarakat secara individu, tetapi membangun infrastruktur umum untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus pemberdayaan semua masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; Penyediaan sumber daya keuangan melalui Bantuan Langsung Mandiri (BLM) bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target *Milenium Developments Goals (MDGs)* dan Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan merupakan desa yang terdiri dari 18 dusun yang keadaan perekonomiannya dirasa relatif lemah. Warga mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sedangkan yang berstatus sebagai pengusaha serta pegawai negeri hanya sebagian kecil. Melihat kondisi seperti ini, jika masyarakat hanya mengandalkan penghasilan sebagai buruh dan petani tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pastilah mengalami kekurangan.

Masyarakat Sendangsari mulai bangkit dan berusaha untuk menambah penghasilannya. Mereka mulai menciptakan usaha rumah tangga ataupun

usaha kecil, seperti membuat tempe, emping, kerajinan tangan dan industri rumahan lainnya. Potensi usaha kecil masyarakat Sendangsari relatif bagus, namun sangat disayangkan masyarakat Sendangsari mengalami kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Melihat keadaan ini, maka ketika ada suatu kebijakan dari pemerintah yaitu PNPM Mandiri, khususnya program PNPM Mandiri Pedesaan yang memberikan kredit bergulir untuk modal, antusias masyarakat sangat tinggi.

Program PNPM memberikan banyak peranan penting terhadap kehidupan masyarakat di Desa Sendangsari, namun seperti pada umumnya suatu kegiatan selain memberikan banyak peranan dalam kehidupan masyarakat pasti juga mengalami berbagai permasalahan yang muncul seperti halnya pada implementasi PNPM Mandiri Pedesaan ini. Munculnya permasalahan dapat berasal dari pihak masyarakat penerima manfaat maupun para pelaksana kegiatan.

Permasalahan tersebut antara lain macetnya angsuran pinjaman bergulir yang diberikan kepada salah satu kelompok masyarakat penerima, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya dan begitu saja melepas tanggung jawab atau dapat dikatakan ketidaktertiban pembayaran angsuran. Selanjutnya mengenai kualitas hasil pembangunan dari program PNPM Mandiri Pedesaan yang berupa sarana/prasarana hasilnya kurang bagus. Kualitas hasil pembangunan yang kurang bagus ini tentunya berkaitan dengan sikap, mental dan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini, dengan indikasi adanya penyalahgunaan bantuan yang diselewengkan. Penyelewengan ini dapat dilakukan pada masalah kuantitas maupun kualitas dari bahan yang dipakai untuk pembangunan sarana/prasarana tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Persoalan lain adalah ada sebagian warga yang belum tersentuh dari program ini.

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang administrasi publik tentang studi efektivitas kebijakan publik. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan kepada Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Tinjauan Pustaka

Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. H. Emerson yang dikutip Handyaningrat S (1994:16) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Selanjut menurut (Kurniawan, 2005:109). “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”

Tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang

telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Menurut Gitosudarmo dan Mulyono dalam Makmur (2008:126) mengemukakan bahwa: "Efektivitas organisasi harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungannya yang lebih luas. Efektivitas organisasi juga menunjukkan apakah suatu organisasi mampu bertahan dan hidup terus dalam lingkungannya, sehingga kelangsungan hidup organisasi menjadi ukuran terakhir mengenai efektivitas organisasi".

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Sebagaimana pendapat Suharto (2006:36), Pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Sumaryadi (2005 : 112) secara konseptual, ada tiga prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat antara lain : 1) Pemberdayaan sangat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, baik pada tahap perencanaan program, pelaksanaan maupun pada tahap pengembangannya. 2) Pemberdayaan selalu tidak memisahkan antara fisik proyek dengan pelatihan ketrampilan dan 3) Sumber dana bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat umumnya berasal dari anggaran pemerintah, partisipasi pihak swasta dan dari partisipasi masyarakat sendiri.

Menurut Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009 : 60).

Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 60).

Sesuai dengan pengertian pemberdayaan dari beberapa teori yang disampaikan di atas, secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatannya secara aktif.

PNPM Mandiri

Pelaksanaan PNPM merupakan kelanjutan dari program serupa, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri ini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menko Kesra No.25/KEP/MENKO/ KESRA/2007 yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri 2008 tujuan umum PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Untuk tujuan khususnya yaitu meliputi: 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; 2) Meningkatnya kapasitas

kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*); 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; 5) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah upaya tercapainya tujuan program nasional yang merupakan suatu formulasi dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan melibatkannya secara langsung. Sehingga indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat (Martani dan Lubis 1987:55), yang dipadukan dengan program dan tujuan PNPM mandiri meliputi :

1. Pendekatan Sumber yaitu merupakan efektivitas dari input, meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Sumber Daya Keuangan
2. Pendekatan Proses yaitu untuk menunjukkan efektivitas dari proses kegiatan meliputi:
 - d. Efisiensi
 - e. Keterbukaan
 - f. Keadilan
 - g. Bertanggung jawab

3. Pendekatan Sasaran (tujuan) yaitu untuk menunjukkan efektivitas dari pencapaian tujuan meliputi:
 - h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
 - i. Meningkatkan Sinergi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara jelas kenyataan empiris yang terjadi di lapangan serta menuangkannya kedalam pernyataan- pernyataan sesuai dengan fenomena yang terjadi (Moleong, 2006:11). Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sample dengan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 1998:128). Adapun tujuan menggunakan teknik sampling ini adalah untuk mendapatkan orang-orang yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti dan dijadikan sebagai informan yaitu:

- a. Lurah Desa Sendangsari : 1 orang
- b. Tim Pengelola Keuangan (TPK) desa Sendangsari : 1 orang
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) : 1 orang
- d. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Pajangan : 1 orang
- e. Ketua Kelompok Masyarakat penerima program : 2 orang
- f. Masyarakat penerima program : 4 orang

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan atau mendiskripsikan data secara sistematis,

logis serta merangkai data dalam bentuk pernyataan yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Desa Sendangsari. Peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan objek penelitian, indikator dalam penelitian ini adalah : pendekatan sumber (input) meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan. Pendekatan proses yang meliputi : efisiensi, keterbukaan, keadilan, bertanggung jawab. Pendekatan sasaran (tujuan) yang meliputi : meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat. berikut ini hasil analisis yang peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan.

Dalam pendekatan sumber yang meliputi sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumber keuangan, hasil penelitian adalah sebagai berikut : Dalam pelaksanaan program pemerintah ketersediaan sumber daya sangat penting, salah satunya sumber daya manusia (SDM). Pihak TPK yang melaksanakan pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan tidak hanya terkait pada pemahaman unsur teknis di lapangan, tetapi tanggung jawab dan komitmen di tingkat desa sangat penting yang melibatkan masyarakat penerima manfaat untuk peranannya dalam upaya mensukseskan program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari.

Dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sumber daya aparatur pelaksana dan *stakeholder* lain yang terlibat dalam program PNPM Mandiri Pedesaan merupakan faktor penting sebagai penentu keberhasilan

program. Jika SDM sebagai pelaku kegiatan mampu menggerakkan kegiatan dan memiliki dedikasi yang baik dalam menjalankan tugas dapat dipastikan satu unsur penting sudah terpenuhi. Meskipun demikian ada faktor lain yang harus dipenuhi dan faktor lain itu nantinya akan dikelola dan dimanfaatkan oleh SDM. Meskipun SDM menjadi tolok ukur penggerak keberhasilan pelaksanaan kegiatan, namun beberapa SDM pelaku kegiatan di Desa Sendangsari (TPK) kurang memiliki komitmen dan kompetensi. Selama ini belum pernah dilakukan pergantian pengurus.

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari memerlukan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan lancar. Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai sarana dan prasarana dalam kegiatan infrastruktur berupa konstruksi bangunan, peralatannya sebagian atas swadaya dari warga masyarakat. Pemenuhan kebutuhan peralatan yang tidak dimiliki oleh Desa Sendangsari didatangkan dari luar desa dan untuk tenaga kerja dapat memanfaatkan warga dari Desa Sendangsari sendiri melalui kelompoknya, karena sebagian besar dari tenaga merupakan swadaya. Secara khusus untuk tenaga konstruksi baja, didatangkan dari luar desa karena kondisi peralatan dan kemampuan di desa yang belum terpenuhi. Sedangkan untuk material-material pendukung dibeli oleh TPK di Toko bahan material sekitar lokasi pekerjaan. Saat ini program kegiatan Corblok Beton yang dilaksanakan di Desa Sendangsari sudah baik karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan secara aktif. Bahan yang digunakan dalam pembangunan adalah dari Desa Sendangsari dan daerah sekitar memiliki kualitas atau mutu yang cukup baik.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil wawancara dengan informan, sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM

PNPM Mandiri Pedesaan, sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Swadaya masyarakat dan Partisipasi dunia usaha. Dengan adanya keterbatasan dana maka dalam implementasi program PNPM Mandiri Pedesaan ada kriteria alokasi dana bahwa alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin. Dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan juga diterangkan mengenai mekanisme pencairannya sehingga diharapkan bantuan tersebut tidak bocor. Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan. Mekanisme penyaluran dana yang ada di Desa Sendangsari sudah sesuai dengan PTO Program PNPM Mandiri Pedesaan namun karena keterbatasan pendistribusian dana tidak semua masyarakat miskin menerima bantuan sehingga masyarakat merasa pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sangat minim terutama untuk dapat mengembangkan usahanya.

Pendekatan Proses yang meliputi, efisiensi, keterbukaan dan keadilan hasil penelitian adalah sebagai berikut : Keefisienan dalam implementasi program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yaitu diwujudkan dalam mencari dan membandingkan harga barang/jasa untuk kualitas yang sama/setara serta memilih harga terendah sesuai kebutuhan. Penyediaan barang/jasa dilakukan

melalui suplayer yang menang dalam lelang. Contoh keikutsertaan pihak swasta dalam menyuplai material yang dibutuhkan oleh TPK seperti dalam tabel berikut ini

**Daftar Pemenang Lelang Pengelola Kegiatan PNPM MP
Desa Sendangsari Tahun 2013**

No	Suplayer	Alamat	Jenis Material	Harga (satuan)	Sat.
1	Waidal	Jaten, RT o3, Sendangsari, Pajangan	Batu putih	80.000	M ³
2	UD Kasih Ibu	Jl. Raya Srandakan, Pandak	PC	50.000	M ³
3	Waidal	Jaten, RT o3, Sendangsari, Pajangan	Pasir	80.000	M ³
4	Jarwato	Benyo, Sendangsari, Pajangan	Batu kali	80.000	M ³
5	Wahyo	Nyemplung Kidul, Ambarketawang	Baja	10.800	Kg

Sumber : Laporan Akhir Kegiatan PNPM-MP T.A 2013, Sendangsari

Lelang tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013, proses lelang dilakukan secara terbuka di Pendopo Desa Sendangsari. Penyediaan material ini untuk pengelolaan kegiatan jembatan Benyo dan perkerasan conblok beton. Material-material pendukung dibeli oleh TPK di toko bahan material di sekitar lokasi pekerjaan.

Dalam hal keterbukaan, Hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari berprinsip pada transparansi. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka. Dengan keterbukaan masyarakat memiliki keterlibatan untuk ikut mengawal pelaksanaan hingga sampai terselenggaranya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Kelompok penerima ikut mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi program.

Berkaitan dengan keadilan, hasil wawancara dengan informan menunjukkan, bahwa di dalam membuat kebijakan, Pemerintah berupaya mendesain program yang menerapkan unsur pemenuhan keadilan bagi kelompok sasaran. Keadilan penting untuk dijadikan prinsip dalam program karena dengan keadilan masyarakat penerima bantuan memiliki kepercayaan yang penuh pada kebijakan pemerintah. Program PNPM Mandiri Pedesaan menerapkan prinsip keadilan dengan tujuan bahwa keadilan harus dirasakan oleh masyarakat penerima. Prioritas keadilan tersebut adalah untuk masyarakat miskin sehingga dalam pengambilan keputusan berpihak pada masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang menerima bantuan perlu diberdayakan agar ada peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Keadilan yang selanjutnya yaitu adanya kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender ini bertujuan bahwa masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan yaitu dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. Salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri Pedesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diketahui pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan Desa Sendangsari sudah

menerapkan prinsip tersebut. Salah satu contoh program perempuan yang masih berkelanjutan yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

Dalam hal tanggung Jawab, hasil wawancara dengan informan, bahwa implementasi program PNPM Mandiri Pedesaan harus dilaksanakan dengan berprinsip akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan, yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan yang dibiayai BLM PNPM Mandiri Pedesaan disebutkan bahwa BLM PNPM Mandiri Pedesaan hanya diperbolehkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang direncanakan secara partisipatif dan dirumuskan melalui musyawarah mufakat. Tanggung jawab yang baik dapat terlaksana apabila dalam organisasi memiliki struktur organisasi yang baik dan para personil yang ada di dalamnya dapat memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Demikian halnya dengan PNPM Mandiri Pedesaan secara nasional memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga dengan struktur organisasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pendekatan Sasaran yang meliputi, meningkatkan partisipasi, Meningkatkan Sinergi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat hasil penelitian sebagai berikut: Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan PNPM-MP sebagai program unggulan pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri diharapkan berhasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan akan terwujud dengan adanya partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari semua kegiatan juga melibatkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat miskin yang menerima bantuan lewat pembentukan kelompok. Sesuai dengan

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan juga dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian mengenai adanya desa berpartisipasi. Desa berpartisipasi ini menyebutkan bahwa seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program.

Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa klaster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah.

Dalam hal sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat. PNPM-Mandiri Pedesaan merupakan program pemerintah yang fokus berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks, maka penyelesaiannya pun membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai objek. Hasil wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari yang menjadi Kelompok Sasaran sesuai dengan PTO program PNPM Mandiri Pedesaan yaitu:

1. Masyarakat miskin di pedesaan,
2. Kelembagaan masyarakat di pedesaan,
3. Kelembagaan pemerintahan lokal.

Melalui Swadaya masyarakat juga program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat karena apa yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan lokal menuju kemandirian, maka:

1. Di setiap desa dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM/K dengan kualifikasi teknik dan pemberdayaan), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara
2. Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Tim Verifikasi, UPK, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL)
3. Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan di antaranya meliputi: penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif
4. Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PPK/PNPM Mandiri Pedesaan di desa dan kecamatan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembentukan, tahapan pengakaran, dan tahapan pengembangan.

Sinergi dalam PNPM Mandiri Pedesaan, dengan pihak swasta merupakan rekanan harus dipahami ini sebagai potensi atau peluang tetapi belum dioptimalkan. Oleh karena itu PNPM Mandiri Pedesaan dengan sosialisasi dan pembuktian kepada pihak swasta dimaksudkan untuk menarik pihak swasta supaya mau bermitra dengan PNPM MP dalam program-program yang terkait.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari, pelaksanaannya sudah sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Pedesaan dan sudah berjalan cukup baik. PNPM Mandiri di Desa Sendangsari sudah menjadi program yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan bahwa semenjak adanya BLM program PNPM Mandiri sampai sekarang tetap berkelanjutan.
2. Hasil penelitian di lapangan berdasarkan indikator yang Peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendekatan Sumber
Dalam penelitian ini mengenai pendekatan sumber sudah terpenuhi, baik itu dari SDM, SDA maupun dana/keuangan, namun untuk SDM sebagai pengelola kegiatan belum pernah diadakan pergantian padahal sebagian SDM belum tentu memiliki kemampuan sesuai dengan tanggung jawabnya dan ini berdampak pada hasil pembangunan. Selanjutnya mengenai keterbatasan dana menyebabkan belum semua masyarakat miskin dan wilayah yang memang berhak mendapatkan bantuan belum semuanya menerima BLM PNPM Mandiri Pedesaan.
 - b. Pendekatan Proses
Proses Pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di Desa Sendangsari sudah sesuai dengan PTO

program. efisiensi, keterbukaan, keadilan dan tanggungjawab dari petugas maupun *stakeholder* terkait, dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dapat ikut mengawasi, mengontrol dan ikut mengevaluasi hasil kegiatan.

c. Pendekatan sasaran

Program PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di Desa Sendangsari sudah sesuai dengan tujuan yaitu dapat meningkatkan partisipasi semua komponen masyarakat yang terkait dengan program PNPM Mandiri Pedesaan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sudah berjalan baik, namun dengan pihak swasta masih belum optimal.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan permasalahan yang ditemukan di lapangan peneliti dapat memberikan masukan terkait program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sendangsari yaitu:

1. Perlu pergantian pengelola kegiatan dengan tujuan untuk penyegaran dan kaderisasi petugas baru. Dengan pergantian petugas diharapkan ada peningkatan untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik dari program PNPM Mandiri Pedesaan.
2. PNPM Mandiri Pedesaan perlu meyakinkan pihak swasta dengan cara sosialisasi dan pembuktian, agar mau bermitra dengan PNPM Mandiri Pedesaan dalam program-program yang terkait.
3. Pemerintah perlu melakukan pendataan berkaitan dengan warga miskin dan keadaan wilayah yang perlu mendapatkan bantuan sehingga nantinya daerah dan warga miskin yang perlu dibantu dapat tersentuh sebagai obyek pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri Pedesaan sehingga daerah dan warga miskin yang mendapatkan

BLM program PNPM Mandiri Pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Hadayaninrat Soerwarno. 1994. *Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan No.25/KEP/MENKO/KESRA/2007 tentang *PNPM Mandiri*.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik .Pembaharuan*. Yogyakarta.
- Makmur. Syarif, 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Efektifitas Organisasi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Martani & Lubis, (1987). *Teori Organisasi*.Bandung: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat:Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: Rafika aditama.
-, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada